

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Lingkungan saat ini menjadi isu penting yang berkembang dimasyarakat. Keberlangsungan lingkungan menjadi hal yang disorot banyak pihak akibat kerap terabaikannya kondisi lingkungan oleh perusahaan. Lingkungan bagi perusahaan juga memiliki pengaruh yang penting tidak hanya bagi lingkungan *intern* perusahaan namun juga *ekstern*. Dalam hubungannya terhadap lingkungan, pada dasarnya terdapat hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan dari perusahaan tersebut. Perusahaan dan masyarakat memiliki hubungan yang saling memberi dan membutuhkan satu sama lain. Dijelaskan dalam Q.S An-Nahl: 90 “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. Maksud dari terjemahan tersebut adalah sesama manusia yang merupakan khalifah dibumi hendaknya saling menciptakan kebajikan, saling menolong dan membantu serta menghindari perbuatan keji yang dapat menimbulkan permusuhan antara satu pihak dengan pihak lain

Keduanya harus bergerak secara dinamis dan bersinergi sehingga tercipta kondisi sinergis dimana keberadaan masyarakat berguna bagi keberlangsungan hidup perusahaan serta keberadaan perusahaan membawa perubahan bagi masyarakat dan

peningkatan taraf hidup masyarakat. Masalah lingkungan sosial merupakan masalah yang sangat sensitif bagi masyarakat. Bagi masyarakat, perusahaan merupakan salah satu faktor pemicu adanya kerusakan yang dialami oleh lingkungan. Jika masyarakat menganggap perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, serta tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan mereka merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan, maka kondisi itu akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap sebuah perusahaan. Perusahaan diharapkan dapat memiliki kepekaan terhadap masyarakat dan lingkungan dengan berkontribusi dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Hal ini yang merupakan isu utama dari perlunya perusahaan untuk melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

Regulasi mengenai CSR juga sebenarnya bukan hal baru dalam dunia korporasi. Di berbagai Negara maju, setiap perusahaan sudah diwajibkan untuk melaksanakan CSR secara periodik. Ini dilakukan untuk mengontrol perilaku perusahaan agar sesuai ketentuan yang berlaku (Tanudjaja, 2006 dalam I Made, 2012). Regulasi ini berkembang dimulai awalnya Dr. Karl.Henrik Robert Dengan kerangka ABCD: yaitu *Awareness*, *BaselineMapping*, *Creating a Vision*, dan *Down to a Action* menjadi sangat terkenal terutama di Eropa. Kemudian berlanjut ISIS - *Compass of Sustainability*, tahun 1997 mulai ditambahkan aspek social dan lingkungan sebagai '*bottom line*' atau tujuan perusahaan yang terinspirasi dari tiga pilar pembangunan berkelanjutan lalu diturunkan menjadi berbagai standar/kriteria dan indikator seperti ISO 26000:2010, *IFC Performance Standards* dan yang terakhir

*Global Reporting Initiative* (GRI) yang berkembang semula 78 item pengungkapan kini menjadi 79 item pengungkapan.

Perkembangan riset-riset mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia menemukan bahwa pengungkapan CSR oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia relatif rendah (Arfan dan Muhammad Ishak, 2005:343 dalam I Made, 2012). Hal ini diduga disebabkan karena perusahaan belum menggunakan laporan tahunan untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (Arfan dan Muhammad Ishak, 2005:343 dalam I Made, 2012).

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan salah satu elemen pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan yang mengungkapkan tanggungjawab lingkungan antara lain Sembiring (2005), Gao et al. (2005), Naser et al. (2006), (Lynes & Andrachuk (2008), Curuk (2009), dan Rustiarini (2011).

Gamerschlag, Mollen, dan Verbeeten (2011) menyajikan bukti empiris mengenai praktik pengungkapan lingkungan dan sosial pada perusahaan perusahaan di Jerman serta menguji beberapa hubungan potensial antara karakteristik perusahaan dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan industri berhubungan dengan jumlah pengungkapan sedangkan profitabilitas tidak. Interaksi antara ukuran perusahaan dan industri menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang lebih kuat antara perusahaan dalam industri yang *high-profile* dibandingkan dengan industri yang *low-profile*.

*Size* (ukuran perusahaan) merupakan variabel yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan (Yulfaida dan Zhulaikha, 2012). Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara *size* perusahaan dengan *CSR disclosure* yang dilakukan oleh Permana dan Raharja (2012), Utami dan Rahmawati (2010), Sari (2012). Sedangkan Laksmitaningrum dan Purwanto<sup>1</sup> (2013) tidak menemukan hubungan signifikan antara kedua variabel tersebut.

Ukuran dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang fungsi utamanya adalah memberi perhatian secara bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan untuk mencapai tujuan dalam perusahaan perusahaan. Hubungan ukuran dewan komisaris dengan *corporate social responsibility* yaitu semakin besar ukuran dewan komisaris, akan semakin luas pula pengungkapan CSRnya. Hubungan antara dewan komisaris dan pengungkapan CSR juga menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Januarti(2013), Laksmitaningrum dan Purwanto<sup>1</sup> (2013), menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *CSR disclosure*. Bertentangan dengan penelitian Raharja dan Permana<sup>1</sup> (2012), Utami dan Rahmawati (2010) mengungkapkan ukuran dewan komisaris berpengaruh tidak signifikan terhadap *CSR disclosure*.

*Leverage* menunjukkan proporsi total kewajiban terhadap total *ekuitas* pemegang saham. *Rasio* tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang (Wardani dan Januarti, 2013). Hubungan *leverage* dengan

*corporate social responsibility* yang dilakukan oleh peneliti menyatakan Laksmitanigrum dan Purwanto (2013), Wardani dan Januarti<sup>1</sup> (2013), Sari (2012), Permana dan Raharja (2012) menyatakan tidak signifikan antara *leverage* dan CSR *disclosure*.

Profitabilitas menurut Purwandari dan Purwanto (2012) adalah pengukuran efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan telah dijadikan untuk mencerminkan pandangan bahwa reaksi sosial memerlukan manajerial yang dapat membuat perusahaan memperoleh keuntungan (Wardani dan Januarti, 2013). Beberapa penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara profitabilitas terhadap CSR *disclosure* seperti, Sari (2012), Permana dan Raharja (2012), Wardani dan Januarti<sup>1</sup> (2013), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara *profitabilitas* dengan CSR *disclosure*.

Tipe industri berpengaruh terhadap luas pengungkapan sosial perusahaan. Tipe perusahaan yang lebih tinggi (*high-profile*) lebih banyak mengungkapkan kegiatan sosial perusahaan dibandingkan tipe perusahaan yang lebih rendah (*low-profile*) (Utomo, 2000 dalam Karina dan Yuyetta (2013). Peneliti yang menyatakan adanya hubungan *profile* dan CSR *disclosure* yang dilakukan oleh Permana dan Raharja (2012) menyatakan adanya hubungan signifikan antara *profile* dengan CSR *disclosure*. Sari (2010) juga menyatakan adanya hubungan signifikan antara *profile* dengan CSR *disclosure*.

Kepemilikan saham oleh publik adalah jumlah saham yang dimiliki oleh publik. Pengertian publik disini adalah pihak individu di luar manajemen dan tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Mulyono, 2010). Semakin besar saham yang dimiliki oleh publik, akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan, investor ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang tempat berinvestasi serta dapat mengawasi kegiatan manajemen, sehingga kepentingan dalam perusahaan terpenuhi (Rahajeng, 2010).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia memunculkan hasil yang beraneka ragam sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hasil yang menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan saham oleh publik yang berpengaruh signifikan pada pengungkapan CSR diungkapkan oleh Sembiring (2005). Penelitian Anggraini (2006) menemukan bahwa profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan tidak mempengaruhi pengungkapan informasi CSR. Namun variabel tipe industri ditemukan memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil yang didapat sejalan dengan hasil penelitian yang didapat Hackston dan Milne (1996) dalam Anggraini (2006) yang tidak menemukan hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari Febriana & IGN Agung Suaryana tahun 2011. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Perbedaan penelitian

ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian, obyek penelitian, periode penelitian, dan teknik analisis yang digunakan. Penelitian ini meneliti variabel tingkat *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, tipe industri, kepemilikan saham oleh publik dengan obyek penelitian perusahaan publik yang terdaftar di BEI dan menggunakan pedoman *sustainability reporting* dari *Global Reporting Initiative* (GRI) yang berisi 79 item pengungkapan

## B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan CSR?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan CSR?
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan CSR?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan CSR?
5. Apakah tipe industri berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan CSR?
6. Apakah kepemilikan saham oleh public berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan CSR?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap kebijakan pengungkapan CSR
2. Mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kebijakan pengungkapan CSR
3. Mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap kebijakan pengungkapan CSR
4. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan pengungkapan CSR
5. Mengetahui pengaruh tipe industri terhadap kebijakan pengungkapan CSR
6. Mengetahui pengaruh kepemilikan saham oleh public terhadap kebijakan pengungkapan CSR



#### D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, sebagai berikut:

##### 1. BAGI PENULIS

Bagi penulis penelitian ini dapat memacu minat dan keinginan untuk memahami tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mengetahui manfaat dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

##### 2. BAGI PERUSAHAAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perusahaan tentang pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dan dapat memberikan kontribusi pemikiran akan pentingnya kewajiban untuk menjaga lingkungan dan dampak sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kepedulian pada lingkungan sosialnya.

##### 3. BAGI INVESTOR

Sebagai pertimbangan dalam sebuah pengambilan keputusan investasi, guna menentukan perusahaan yang dapat memberikan pengembalian investasi, tanpa melupakan tanggung jawab sosialnya.

#### 4. BAGI MAHASISWA

Dapat memberikan pemahaman mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang akuntansi pertanggungjawaban sosial.

#### 5. BAGI MASYARAKAT

Dapat memberikan stimulus secara proaktif sebagai pengontrol atas perilaku perilaku perusahaan dan semakin meningkatkan kesadaran akan hak-hak yang harus diperoleh.